

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan suatu daerah merupakan salah satu tindakan guna mewujudkan tujuan negara dalam bidang perekonomian berupa kemakmuran. Untuk mewujudkannya diperlukan syarat-syarat yang harus terpenuhi, misalnya pemerataan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam secara maksimal, lapangan pekerjaan terbuka luas, mengurangi kemiskinan, sarana dan prasarana transportasi yang menjangkau hingga ke daerah-daerah, pemerataan pendidikan dan kesehatan.

Dilihat dari sisi ilmu ekonomi, pembangunan berarti upaya guna mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibanding dengan laju pertumbuhan penduduknya. (Todaro, 2011)

Secara sederhana pembangunan berarti adanya peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk suatu negara secara berkelanjutan. Sedangkan dalam lingkup daerah biasa disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sedangkan PDRB perkapita berarti PDRB dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil dilihat dari beberapa indikator misalnya adanya pertumbuhan ekonomi dan disparitas ekonomi yang menurun.

PDRB adalah ukuran dasar kegiatan ekonomi yang merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. (BPS, 2014) PDRB dapat menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dengan melihat perbedaan pendapatan dari tahun-tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan harga konstan dan harga berlaku. Perekonomian dikatakan tumbuh jika terjadi peningkatan pendapatan dari tahun sebelumnya. Namun jumlah penduduk juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dengan PDRB tinggi disuatu daerah bukan berarti tingkat kesejahteraannya tinggi. Jumlah penduduk yang tinggi akan mempengaruhi PDRB per kapita menjadi rendah.

Ketimpangan antar wilayah atau disparitas merupakan perbedaan pembangunan yang terjadi antara satu daerah dengan daerah lain sehingga terjadi pembangunan yang tidak merata. Hal ini diakibatkan oleh perbedaan potensi sumber daya alam yang dihasilkan oleh suatu daerah yang selanjutnya akan mempengaruhi hasil produksi masing-masing daerah. Ada daerah yang mampu memproduksi suatu komoditas dengan harga yang rendah dan ada yang harus membayarnya dengan harga yang relatif mahal. Hal inilah yang selanjutnya mengakibatkan adanya daerah yang mampu untuk cepat tumbuh, cepat berkembang serta mengalami pertumbuhan yang lambat. Selanjutnya perbedaan struktur kependudukan seperti tingkat pendidikan, jumlah penduduk, tingkat kesehatan, skill atau kemampuan bekerja dan tenaga kerja dapat mendorong

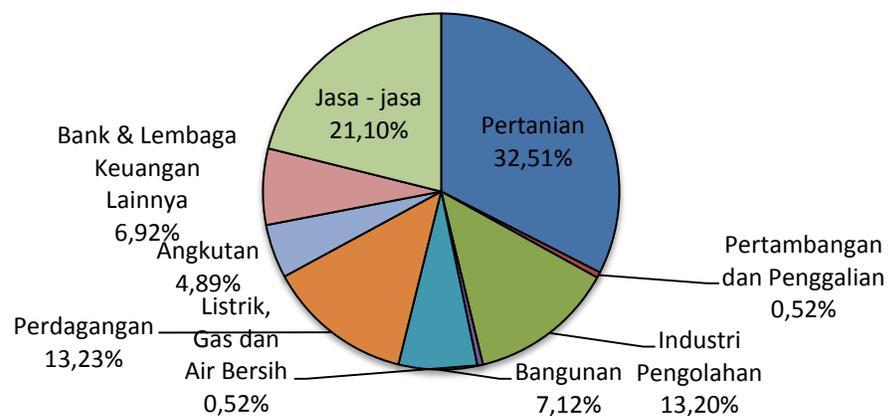
adanya disparitas antar wilayah. Hal ini akan mempengaruhi tingkat produktivitas daerah tersebut. Dan adanya konsentrasi kegiatan ekonomi di suatu wilayah.

Ketimpangan bukan terjadi hanya antar pulau, pulau Jawa sebagai pusat pembangunan dan pulau-pulau yang terbentang dari sabang hingga marauke. Namun juga dapat terjadi diruang lingkup yang lebih kecil yaitu antar daerah yang satu dengan yang lain, misalnya antar satu kecamatan dengan kecamatan lain dalam satu kabupaten. Disparitas disebabkan karena adanya perbedaan sumber daya dan potensi setiap daerah yang dihasilkan. Hal ini dapat dilihat dari PDRB per kapita setiap kecamatan sebagai indikator pemerataan pendistribusian pendapatan dan pembangunan.

Rata-rata PDRB kabupaten Banjarnegara dari tahun 2010-2014 juga cenderung meningkat setiap tahunnya. Dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,26 pada tahun 2014. Peningkatan PDRB sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi kearah yang semakin baik belum tentu mengindikasikan kesejahteraan yang semakin berkurang. Seperti penelitian yang dilakukan sebelumnya menyatakan bahwa pertumbuhan pendapatan yang tidak dapat dinikmati oleh penduduk secara merata akan mengakibatkan adanya peningkatan disparitas pendapatan di suatu wilayah (Wijayanto, 2016). Dengan menggunakan ukuran pendapatan perkapita diharuskan adanya laju pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk daerah tersebut.

Dilihat dari penerimaan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010-2014 kabupaten Banjarnegara menempati urutan terbawah jika dilihat dari tingkat karesidenan yaitu kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga. Serta memberikan kontribusi PDRB Provinsi Jawa Tengah di urutan ke 27 dilihat dari total 35 kabupaten lainnya. (BPS,2014)

**Gambar 1.1.**  
Kontribusi Sektor Usaha Terhadap PDRB Tahun 2014



Sumber : BPS 2014

Sektor pertanian, Industri Pengolahan dan Jasa-jasa memberikan kontribusi terbesar dalam penyusunan PDRB kabupaten Banjarnegara dengan masing-masing nilainya sebesar 32,51%, 13,20%, dan 21,10%. Sedangkan pada sektor lain masing-masing memberikan kontribusi yaitu pertambangan dan penggalian sebesar 0,52%, listrik, gas dan air bersih sebesar 0,52%, bangunan sebesar 7,12%, perdagangan sebesar 13,23%, angkutan sebesar 4,89% serta bank & lembaga keuangan lainnya sebesar 6,92%.

Adanya aktifitas yang terus berjalan secara berkesinambungan memberikan dampak pada perubahan struktur ekonomi di kabupaten Banjarnegara. pada periode 2010-2014 peranan kategori pertanian mengalami penurunan dari 35,85% tahun 2010 menjadi 32,51% tahun 2014. Meskipun peranannya cenderung mengalami penurunan namun sektor pertanian masih menjadi sektor basis dan memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian kabupaten Banjarnegara. Penyerapan terendah ada pada sektor Listrik, Air Bersih dan Gas yaitu sebesar 0,48% tahun 2010 dan mengalami peningkatan menjadi 0,52% tahun 2010.

Menurut Lincoln Arsyad 1999, setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif membangun daerah. Pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber daya yang ada berupaya mengintervensi potensi sumber daya yang ada untuk merancang membangun perekonomian daerah. Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang ditetapkan dan berhasil pada suatu daerah yang belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi daerah lain. Kebijakan yang diambil dalam proses pembangunan suatu daerah haruslah sesuai dengan kondisi (masalah, kebutuhan dan potensi) daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu,

penelitian yang mendalam tentang keadaan tiap daerah harus dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang berguna bagi penentuan perencanaan pembangunan daerah yang bersangkutan.

Dilihat dari masing-masing kecamatan, terdapat perbedaan besaran kontribusi pada setiap sektor penyusun PDRB yang bergantung pada kondisi alam masing-masing kecamatan dan penguasaan sumber daya manusia sehingga sektor tersebut mampu berkembang dan menjadi sektor unggulan.

Di tahun 2014 kecamatan Banjarnegara menempati urutan pertama PDRB atas dasar harga konstan sebesar Rp 509.932.740.000,00 dengan sektor unggulan jasa-jasa, perdagangan dan bank&lembaga keuangan. Peringkat kedua yaitu kecamatan Purworejo Klampok sebesar Rp 389.507.560.000,00 dengan sektor unggulan industri, perdagangan dan jasa-jasa. Sedangkan yang berada di posisi terendah yaitu kecamatan Pandanarum yaitu sebesar Rp 34.445.300.000,00 dengan sektor unggulan pertanian, jasa-jasa dan perdagangan. (BPS, 2014)

Sedangkan jika dilihat dari penerimaan PDRB per kalita menurut harga konstan di tahun 2014 kecamatan Purworejo Klampok menempati urutan pertama dengan perolehan sebesar Rp 9.499.026,00, kemudian diurutan dua kecamatan Banjarnegara dengan perolehan sebesar Rp 8.814.741,00 dan diurutan terakhir yaitu kecamatan Pagedongan dengan perolehan sebesar Rp 1.373.947,00. (BPS, 2014)

Dari data diatas terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara jumlah penerimaan PDRB per kapita dari masing-masing kecamatan di kabupaten Banjarnegara. Meskipun terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya, adanya perbedaan ini mengindikasikan belum meratanya tingkat pendistribusian pendapatan di setiap wilayahnya.

Pentingnya masalah pembangunan ekonomi terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan guna mengurangi kesenjangan ekonomi serta memaksimalkan sektor unggulan masing-masing kecamatan di kabupaten Banjarnegara maka penulis mengambil judul dalam skripsi ini yaitu :  
**“ANALISIS PEREKONOMIAN KECAMATAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2010-2014”.**

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini akan terfokus menganalisis mengenai pertumbuhan ekonomi, disparitas regional, dan sektor unggulan masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara tahun 2010-2014 dengan variable yang digunakan yaitu Produk Domestik Regional Bruto setiap kecamatan yang ada di kabupaten Banjarnegara.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis akan mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana struktur perekonomian masing-masing kecamatan di kabupaten Banjarnegara?
2. Apakah yang menjadi sektor unggulan masing-masing kecamatan di kabupaten Banjarnegara?
3. Bagaimana pola struktur pertumbuhan ekonomi serta klasifikasi kecamatan di kabupaten Banjarnegara menurut typology klassen?
4. Berapa tingkat kesenjangan PDRB masing-masing kecamatan di kabupaten Banjarnegara?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis struktur perekonomian kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.
2. Menganalisis sektor unggulan pada masing-masing kecamatan di kabupaten Banjarnegara.

3. Mengklasifikasikan gambaran pola dan struktur pertumbuhan pada masing-masing kecamatan di kabupaten Banjarnegara menggunakan typologi klassen.
4. Menganalisis tingkat kesenjangan PDRB masing-masing kecamatan di kabupaten Banjarnegara.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai keadaan perekonomian kecamatan di kabupaten Banjarnegara, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara praktik, diharapkan mampu memberikan informasi kepada pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat terkait dengan masalah-masalah ketimpangan pendapatan, tingkat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan potensi sektor unggulan pada masing – masing kecamatan.
2. Secara teoritis, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan teori terutama dalam hal perekonomian suatu daerah.